

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN DI SUMATERA UTARA

Paidi Hidayat

Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi USU, Medan

Wahyu Ario Pratomo

Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi USU, Medan

D. Agus Harjito

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta

Abstract

This research attempts to analyze the implementation of regional autonomy to the financial performance in newly-formed district government of North Sumatra. It focuses on the performance of original regional income after fiscal decentralization and the regional financial independency. The result shows that regional autonomy has a positive impact on the growth of original regional income. However, the share of those incomes to regional budget is still small. The newly-formed districts in North Sumatra are unready to face the regional autonomy policy. Most of the newly-formed regencies/municipalities are very dependent to balanced fund through General Allocation Fund and Special Allocation Fund.

Keywords: *regional autonomy, original regional income, fiscal decentralization.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu

daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Sejalan dengan perubahan UU otonomi daerah tersebut, tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pembiayaannya.

Oleh karena itu, kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilitasi sumber daya keuangan untuk membiayai pelbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksekutif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu analisis dan pengkajian secara mendalam tentang kinerja kemampuan keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara ditinjau dari aspek pendapatan asli daerahnya (PAD) setelah otonomi daerah, yang akan digambarkan melalui suatu peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran (Bappenas, 2003).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam studi ini adalah, (1) Bagaimana kinerja

kemampuan keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara ditinjau dari aspek pendapatan asli daerahnya setelah otonomi daerah; dan (2) Bagaimana peta kemampuan keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dengan metode kuadran.

KAJIAN TEORITIS

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Menurut Tjokroamidjojo (1993) bahwa pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Astuti dan Joko (2005) menunjukkan suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir disemua daerah di Indonesia bahwa rasio DAU terhadap total pendapatan daerah melebihi angka 50 %. Sementara itu dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah terlihat bahwasanya daerah yang PADnya besar tidak berubah dari daerah yang berada di Pulau Jawa yang notabene memiliki populasi penduduk paling besar. Sedangkan untuk daerah diluar Pulau Jawa masih menunjukkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan, hanya propinsi Sumatera Utara dan propinsi Lampung yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

Hasil kajian Halim dan Jamal (2006) di kota Malang dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah adalah belum optimal dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBD kota Malang rata-rata sebesar 13,23 % selama tahun 2000 – 2004. Sedangkan kemampuan PAD untuk menopang penge-

luaran daerah relatif masih rendah dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,51 % untuk periode yang sama, sehingga ketergantungan Pemkot Malang terhadap sumber keuangan lain masih relatif tinggi. Sementara untuk realisasi PAD selama tahun 2000 – 2004 melebihi dari yang ditargetkan yakni rata-rata sebesar 103,97 % dengan pertumbuhannya rata-rata sebesar 29,73 % per tahun walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang menurun.

Hasil penelitian Sumiyarti dan Akhmad (2005) menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap pembentukan PDRB kota Depok. Relatif kecilnya nilai koefisien regresi PAD dikarenakan masih kecilnya kontribusi PAD dalam penerimaan APBD yang menyebabkan pengaruh variabel PAD terhadap APBD menjadi tidak berarti (insignifikan). Sedangkan variabel Dana Perimbangan memberikan pengaruh terhadap PDRB kota Depok secara positif dan signifikan. Hasil temuan ini mengesankan masih besarnya ketergantungan pemerintah kota Depok terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, hasil penelitian Insukindro, dkk (1994) dimana sumbangan PAD terhadap total penerimaan daerah (APBD) masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan upaya untuk merealisasikan peningkatan PAD tidak berdasarkan potensi PAD yang ada, akan tetapi ditargetkan berdasarkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Begitupun hasil studi Mulyono (2005) memperlihatkan derajat otonomi fiskal kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara masih berada pada interval sangat kurang (0,00 – 10,00 %). Sedangkan hasil estimasi data panel dengan metode GLS, baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah, bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara,

kecuali PAD yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional setelah otonomi daerah.

Sementara itu, hasil penelitian Hidayat dan Sirojuzilam (2006) menemukan bahwa penerimaan PAD Kota Medan terus mengalami peningkatan, walaupun rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 43,14 % dan yang masih mendominasi sumber penerimaan PAD kota Medan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk derajat otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) kota Medan, rata-rata berada pada skala interval sedang. Sedangkan pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Medan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Namun dilihat dari nilai koefisiennya, Dana Perimbangan masih mendominasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan masih menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji kinerja kemampuan keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dari aspek PAD selama periode 2001 – 2006. Adapun kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian ini adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya, kajian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Keuangan (Dirjen PKPD) untuk kurun waktu 2001 - 2006.

Beberapa parameter yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kemampuan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dalam berotonomi, yaitu:

1. Untuk mengukur kinerja PAD di suatu daerah, antara lain:
 - a. Analisis pertumbuhan (*growth*) PAD merupakan angka pertumbuhan PAD setiap tahunnya di masing-masing kabupaten/kota pe-mekaran.
 - b. Analisis peranan (*share*), yaitu rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah (APBD), dimana rasio ini digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan.
2. Analisis peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran.
 - a. Metode kuadran yaitu salah satu cara menampilkan peta kemam-puan keuangan daerah dengan masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai pertumbuhan (*growth*) dan peranan (*share*).

Tabel 1: Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Disini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber: Bappenas (2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Keuangan Kabupaten/Kota

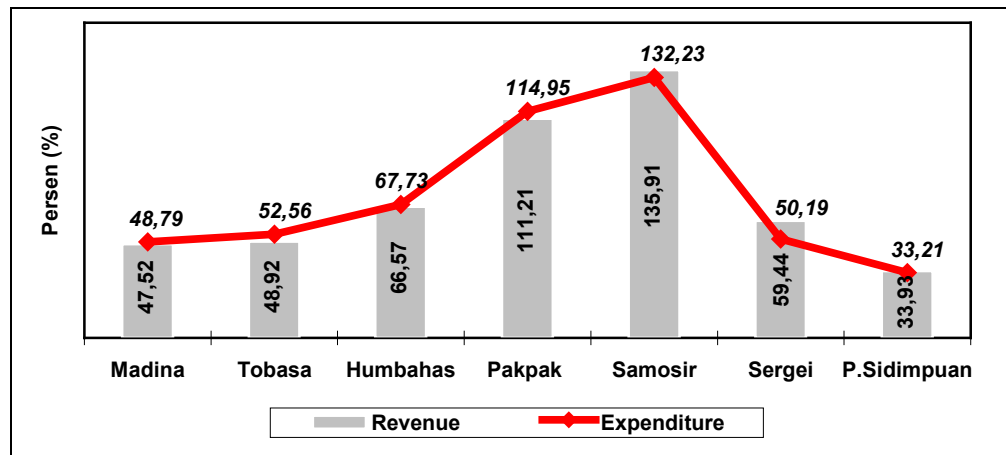
Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari APBD yang merupakan sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Berikut ini perkembangan APBD kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara seperti yang terlihat pada Tabel 2 di bawah.

Berdasarkan Tabel 2 bahwa perkembangan APBD untuk kabupaten/kota pemekaran secara umum memperlihatkan tren yang terus meningkat selama otonomi daerah, kecuali untuk kabupaten Toba Samosir dan kabupaten Mandailing Natal yang mengalami penurunan pada tahun 2004 dan 2005. Namun demikian, pada tahun 2006 kabupaten/kota yang memiliki APBD terbesar adalah kabupaten Serdang Bedagai dan Mandailing Natal, sedangkan kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten yang memiliki APBD yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yakni hanya sebesar Rp. 189,4 miliar.

Tabel 2: Perkembangan APBD Kab/Kota Pemekaran di Sumut (Rp. Miliar)

No	Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Mandailing Natal	180.1	187.9	233.2	229.1	238.2	388.3
2	Toba Samosir	173.5	202.5	317.1	226.1	171.2	291.7
3	Humbang Hasundutan	-	-	-	106.2	123.3	267.6
4	Pakpak Bharat	-	-	-	43.3	78.7	189.4
5	Samosir	-	-	-	-	107.5	253.6
6	Serdang Bedagai	-	-	-	-	258.6	412.3
7	Padang Sidempuan	-	83.0	139.0	170.7	177.0	250.9

Sumber: Sumut Dalam Angka 2001 - 2006



Gambar 1: Rerata Pertumbuhan Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara

Sementara itu, dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran kabupaten/kota pemekaran memperlihatkan bahwa kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat memiliki rata-rata pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan penerimaan. Sedangkan untuk kabupaten Samosir, kabupaten Serdang Bedagai, dan kota Padang Sidempuan memiliki pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan pengeluarannya.

Pertumbuhan PAD (*Growth*).

Kinerja keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya dan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD dari daerahnya sendiri. Sehingga ciri utama daerah otonom adalah terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumahtangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Dengan demikian, otonomi daerah akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan yang biasanya diukur dengan derajat otonomi fiskal daerahnya.

Berdasarkan Tabel 3, secara rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara meningkat sebesar 55,47 % per tahun. Dari ketujuh kabupaten/kota tersebut, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif dan relatif cukup tinggi. Untuk kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PAD yang cukup tinggi hingga rata-rata tumbuh sebesar 192,81 % per tahun dan diikuti oleh kabupaten Mandailing Natal sebesar 59,04 %. Sedangkan pertumbuhan PAD yang relatif cukup rendah adalah kabupaten Humbang Hasundutan dengan rata-rata tumbuh sebesar 12,77 % per tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Bappenas (2003) yang menunjukkan adanya peningkatan PAD diseluruh propinsi Indonesia dalam era otonomi daerah. Peningkatan PAD ini dikarenakan meningkatnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada didaerahnya.

Tabel 3: Perkembangan PAD Kab/Kota Pemekaran di Sumut (Rp. Miliar)

No	Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	rerata Pert. PAD (%)
1.	Mandailing Natal	1.94	6.53	5.32	9.11	5.80	8.25	59.04
2.	Toba Samosir	4.34	8.88	12.57	12.01	6.28	10.38	31.86
3.	Humbang Hasundutan	-	-	-	2.76	3.09	3.51	12.77
4.	Pakpak Bharat	-	-	-	0.28	1.38	1.28	192.81
5.	Samosir	-	-	-	-	5.21	6.57	26.10
6.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	12.90	17.16	33.02
7.	Padang Sidempuan	-	2.18	3.48	5.24	4.68	6.14	32.68

Sumber: Sumut Dalam Angka

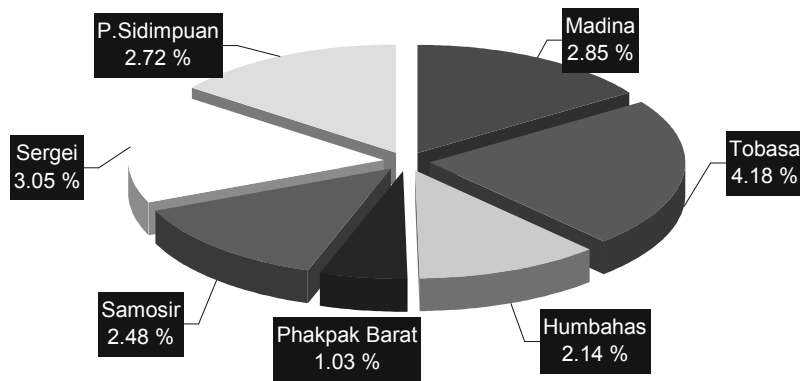
Peran PAD (*Share*) Terhadap APBD.

Desentralisasi fiskal (dalam otonomi daerah) ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah. Sidik (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi daerahnya (keuangan lokal), khususnya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan untuk mengukur kemampuan daerah membiayai belanja daerahnya dapat dilihat dari rasio antara PAD dengan total belanja rutin dan belanja pembangunan daerahnya (APBD).

Dari Gambar 2 di bawah memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara belum mampu untuk membiayai sendiri seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya peranan (*share*) PAD terhadap APBD kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara, dimana secara rata-rata memiliki rasio sebesar 2,63 %. Ini meng-

indikasikan bahwa kemampuan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara hanya mampu membiayai kegiatan belanja rutin dan belanja pembangunan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya hanya sebesar 2,63 % dan sisanya lebih banyak dari subsidi pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK).

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Insukindro, dkk (1994) dimana sumbangan PAD terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih relatif rendah. Sedangkan studi Mulyono (2005) menunjukkan kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara masih memperlihatkan ketergantungannya dengan transfer pemerintah pusat, dimana derajat otonomi fiskalnya masih di bawah 10 %. Begitupun studi yang dilakukan Hidayat dan Sirozujilam (2006) yang menemukan peranan PAD kota Medan masih di bawah 30 % terhadap APBD. Hal ini menunjukkan peranan transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat masih mendominasi dalam struktur APBD kota Medan.

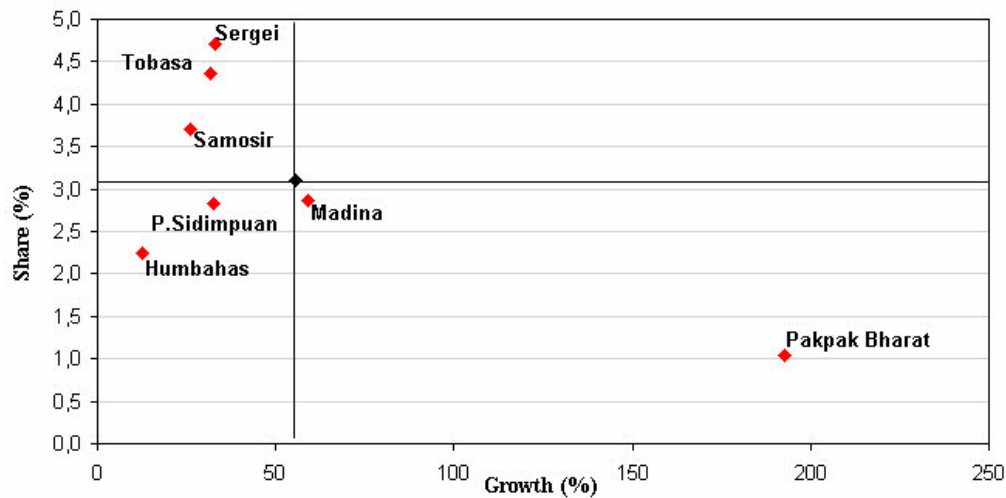


Gambar 2: Rasio PAD Terhadap APDB Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumut

Analisis peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran.

Untuk menggambarkan peta kemampuan keuangan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara digunakan parameter perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran peranan (*share*) PAD terhadap APBD dan pertumbuhan (*growth*) dari masing-masing PAD. Selanjutnya dengan parameter tersebut dapat digambarkan dalam bentuk suatu peta kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran (Bappenas, 2003) dan masing-masing kabupaten/kota pemekaran tersebut dapat diketahui posisinya pada kuadran berapa. Kondisi dari masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara berdasarkan peta kinerja PAD melalui metode kuadran dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 3 berikut ini.

Dari profil kemampuan keuangan dengan metode kuadran diketahui persebaran kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara pada masing-masing kuadran secara umum merata. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa proporsi persebaran kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara berada pada kuadran II (2 kabupaten), kuadran III (3 kabupaten), dan kuadran IV (2 kabupaten/kota). Sedangkan pada kuadran I yang merupakan kondisi ideal bagi suatu daerah otonom, belum ada satupun kabupaten/kota pemekaran yang mencapai kondisi tersebut. Gambaran ini paling tidak memberikan indikasi ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan kurangnya kemandirian daerah dalam berotonomi.



Gambar 3: Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumut Berdasarkan Metode Kuadran.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kabupaten/kota yang berada pada kuadran II (kondisi sedang) adalah kabupaten Mandailing Natal dan kabupaten Pakpak Bharat. Posisi ini sebenarnya menggambarkan kondisi yang belum ideal tetapi daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peranan yang besar dalam struktur APBD. Hal ini ditandai dengan sumbangan PAD terhadap APBD yang masih kecil namun memiliki pertumbuhan PAD yang tinggi. Namun demikian, walaupun mengalami peningkatan PAD yang tinggi, akan tetapi peningkatan PAD yang tinggi tersebut tidak sebanding dengan peningkatan total belanjanya.

Sedangkan pada kuadran III (kondisi sedang) ditempati oleh kabupaten Serdang Bedagai, kabupaten Toba Samosir, dan kabupaten Samosir. Kuadran ini juga belum menunjukkan kondisi yang ideal, dimana sumbangan (*share*) PAD yang besar dalam APBD tetapi berpeluang untuk mengecil dikarenakan pertumbuhan (*growth*) PAD yang kecil.

Sementara untuk kuadran IV (kondisi buruk) adalah kota Padang Sidempuan dan kabupaten Humbang Hasundutan. Posisi ini menggambarkan kondisi yang paling buruk dikarenakan sumbangan PAD dalam APBD dan tingkat pertumbuhan PADnya yang rendah. Hal ini menunjukkan kondisi PAD yang belum mampu mengambil peran yang besar dalam APBD dan pemerintah daerahnya yang belum memiliki kemampuan untuk menggali dan mengembangkan potensi lokalnya.

Hasil temuan ini mengindikasikan kecenderungan daerah untuk mempertahankan (bahkan meningkatkan) transfer dana berupa DAU dari pemerintah pusat yang

jumlahnya semakin besar. Menurut BPS (2004) ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin kecilnya kontribusi PAD terhadap total belanja, yaitu, (1) Masih adanya sumber-sumber pendapatan potensial yang dapat digali akan tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah. (2) Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita. (3) Masih kurang kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat secara rata-rata mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Sedangkan kabupaten Samosir, kabupaten Serdang Bedagai, dan kota Padang Sidempuan mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pengeluarannya.
2. Dilihat dari indikator kinerja PAD, kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan (*growth*) PAD yang positif tetapi relatif masih kecil peranannya (*share*) dalam struktur APBD.
3. Dari peta kemampuan keuangan (metode kuadran), mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Esther S dan Joko Tri Haryanto (2005), “Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Propinsi”. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 12/TH. XXXIV.
- BAPPENAS (2003), *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Halim, Abdul dan Jamal A. Nasir (2006). “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 06/TH. XXXV.
- Hidayat, Paidi dan Sirojuzilam (2006). ”Kajian Tentang Keuangan Daerah Kota Medan di Era Otonomi Daerah”. *Jurnal Wahana Hijau*. Vol. 2 No. 1.
- Ismail, Tjip (2004). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Kaho, J.R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan Keempat.
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyono, Tulus. (2005). *Analisis Pengaruh Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Medan: Sekolah Pascasarjana USU.
- Munir, Dasril., H.A. Djuanda., H.N.S. Tangkilisan (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Prosiding Workshop Internasional (2002). *Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*. Bandung : Fisip Universitas Katolik Parahyangan.
- Saragih, Juli Panglima (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud, dkk. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Yakarta : Kompas Media Nusantara.
- _____ (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribuis Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10 April 2002.
- Sumiyarti dan Akhmad F. Miami. (2005). “Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Kota Depok”. *Jurnal Media Ekonomi*. Vol. 11 No. 2.